

*Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan  
Kemiskinan*

**KEC. PAYAKUMBUH UTARA**

**KOTA PAYAKUMBUH**



**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
BAB I   Pendahuluan.....	1
1.1   Latar Belakang.....	1
1.2   Maksud dan Tujuan.....	4
1.3   Landasan Hukum.....	5
1.4   Sasaran.....	6
1.5   Ruang Lingkup.....	6
1.6   Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II   Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	8
2.1   Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	8
BAB III  Target Serta Lokasi Prioritas.....	12
3.1   Target Program Penanggulangan Kemiskinan.....	12
BAB IV  Panutup.....	15



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara.....	10
Tabel 3.1	Matrik Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.....	13
Tabel 3.2	Matrik Aliran Kas per Sub Kegiatan terkait Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2024.....	14

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan adalah permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua pihak baik itu pemerintah Pusat, Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. Karena sifatnya yang tematik dan multidimensi tersebut, maka agar penanganan masalah kemiskinan menjadi efektif, maka perlu dilakukan koordinasi, sinergi antar semua pihak, dan integrasi antar program-program lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses implementasinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Percepatan dalam penurunan angka kemiskinan telah diupayakan melalui peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres Nomor 166 Tahun 2016 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ditingkat Pusat, sedangkan level daerah dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sebagai langkah untuk memperkuat percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah juga



telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Selain aspek kebijakan, salah satu aspek penting yang mendukung rencana penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya pada kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Data kemiskinan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Penanggulangan kemiskinan yang diukur dengan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator paling utama keberhasilan pembangunan. Hal ini juga sebagaimana telah tercantum didalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005–2024, RPJP Kota Payakumbuh 2005-2025, RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 serta juga selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian SDG's.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak Tahun 1998-2019 terus menurun hingga menyentuh 1 digit. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sekitar 460 ribu orang dibanding September 2022, atau turun 260 ribu orang dibanding Maret tahun lalu. Persentase penduduk miskin nasional juga menyusut dalam setahun terakhir, dari 9,54% pada Maret 2022, menjadi 9,36% pada Maret 2023. Baik dari segi jumlah maupun persentase, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 merupakan yang terendah sejak awal pandemi Covid-19 melanda. Untuk mengatasi hal ini, berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu berbagai program penanggulangan kemiskinan diperkuat dan dimaksimalkan untuk memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan



masyarakat dalam menghadapi tantangan terutama akibat pandemi agar tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan.

Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 340,37 ribu orang (5,95 persen), berkurang sebesar 3,45 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 343,82 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 6,54 ribu orang (dari 140,33 ribu orang pada September 2022 menjadi 133,79 ribu orang pada Maret 2023), sementara pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan naik sebanyak 3,08 ribu orang (dari 203,49 ribu orang pada September 2022 menjadi 206,57 ribu orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada periode September 2022–Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,10 persen. Kenaikannya dari Rp654.194,- perkapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp667.925,- per kapita per bulan pada Maret 2023. Sementara pada periode Maret 2022–Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,33 persen, yaitu dari Rp610.941,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp667.925,- per kapita per bulan pada Maret 2023.

Untuk Kota Payakumbuh sendiri, Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh sebanyak 1,55% atau 2.124 jiwa, turun menjadi 0,77% atau 1.078 jiwa pada tahun 2021. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh turun menjadi 0,10% atau 148 jiwa dan merupakan penduduk miskin ekstrem nomor 2 terendah di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata penurunan kemiskinan ekstrem Kota Payakumbuh adalah 0,81% setiap tahunnya Dalam rangka mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 sesuai dengan instruksi pemerintah pusat perlu partisipasi stakeholder dan kerjasama semua pihak dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh.

Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki luas wilayah 14,53 KM2 dengan jumlah penduduk 32.240 jiwa, dan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kondisi Maret 2022, jumlah penduduk kategori miskin sebesar 6.656 jiwa tersebar di 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara. Hal ini perlu penanganan serius dari pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mengurangi angka kemiskinan.



Salah satu upaya pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (*beneficiaries*).

Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ini disusun dengan maksud untuk mendapat gambaran mengenai sejauh mana capaian pelaksanaan, pengendalian dan capaian program-program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai kelompok bidang dan indikator-indikatornya baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program maupun anggaran belanja di Kota Payakumbuh.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Mengetahui tentang kebijakan (Program, Kegiatan dan Regulasi) penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh;
2. Mengetahui keberhasilan pencapaian penanggulangan kemiskinan di daerah;
3. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
4. Mengetahui profil program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh baik dana dari APBD;
5. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya.



### 1.3 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
2. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
3. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat.
4. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
6. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran disusunnya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

1. Tersedianya analisa data dan informasi kondisi kemiskinan dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan;
2. Tersedianya strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah lima tahun kedepan;
3. Tersedianya panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2024 meliputi

1. Mendiskripsikan tentang kondisi kemiskinan periode lima tahun terakhir;
2. Melakukan analisis dimensi kemiskinan dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan;
3. Memanfaatkan data mikro untuk menentukan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
4. Melakukan tinjauan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan;



5. Menyusun isu strategis dan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan;

### **1.6 Sistematika Penyusunan**

Sistematika dari dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya

BAB III : Target serta lokasi prioritas

BAB IV : Penutup



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya**

Sebagaimana diketahui kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari sisi pengeluaran ekonomi dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Yang dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan bukan makanan, yang besarnya berubah mengikuti laju inflasi dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, konsisten, sistemik dan komprehensif mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang akan diurai dalam berbagai dimensi. Program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada tiga kelompok program, yaitu program bantuan sosial berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta program pro rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara melakukan upaya dengan menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam program-program Pemberdayaan yang menjadi program prioritas guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing sub kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun Anggaran 2023 yaitu :



1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan :
  - Menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan masyarakat baik segi sosial maupun ekonomi
  - Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai tenaga kebersihan lingkungan kelurahan
  - Pengelolaan sampah di kelurahan diharapkan mampu memberi motivasi bagi masyarakat untuk peningkatan taraf hidup melalui pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomi
2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - Membentuk lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang berperan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi
  - Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian permasalahan di kelurahan baik dari segi infrastruktur, sosial maupun ekonomi
  - Memfasilitasi pelaksanaan mufakat RT/RW sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi
  - Memfasilitasi pendataan masyarakat miskin dan penerima bantuan sosial
  - Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan & wawasan Pengurus sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat
  - Memfasilitasi pelaksanaan gotong royong yang bertujuan menciptakan iklim sosial yang bisa memberikan solusi atau memecahkan masalah secara bersama-sama dan terjalin rasa solidaritas di dalam lingkungan Masyarakat
  - Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada Masyarakat.

Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.1  
Realisasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Payakumbuh Utara  
Kota Payakumbuh TA 2023

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target (2023)		Anggaran Tahun 2023 (DPA Perubahan)	Realisasi (2023)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu	
	KEWILAYAHAN/Kecamatan Payakumbuh Utara	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penANGGULANGAN KEMISKINAN	Meningkatkannya penanggulangan kemiskinan dan gangguan	Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM Kelurahan	Kec.Payakumbuh Utara	91	1.799.999.950	1.799.999.950	87%	1.548.473.476	Kecamatan Payakumbuh Utara
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif						100%							
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Persentase Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi		100%	1.799.999.950	1.799.999.950	87%	1.548.473.476	Kecamatan Payakumbuh Utara	
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan		9 Jenis	537.348.480	537.348.480	9 Jenis	449.861.376	Kecamatan Payakumbuh Utara	
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan					Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan		168 kali	1.262.651.470	1.262.651.470	168 kali	1.096.612.100	Kecamatan Payakumbuh Utara	

Capaian realisasi secara keuangan kegiatan pemberdayaan kelurahan pada Tahun 2023 mencapai **Rp. 1.548.473.476-** dari alokasi dana sebesar **Rp. 1.799.999.950,-** dengan capaian realisasi sekitar **87%** dari pagu anggaran program penanggulangan kemiskinan dan capaian Kinerja sekitaran **100%**.

Hasil monitoring dan evaluasi berkala yang telah dilakukan ditemukan beberapa hal :

1. Belum optimalnya Koordinasi antar pemangku kepentingan dan sinkronisasi antar program-program penanggulangan kemiskinan baik dalam pendataan, pendanaan, dan kelembagaan. Sehingga realisasi pelaksanaan pronangkis belum optimal.
2. Pelaksanaan kegiatan belum memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin, hal ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang tersedia.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara.
4. Hasil Identifikasi potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan potensi internal dan eksternal baik dari masyarakat maupun dukungan pemerintah dapat meminimalkan kelemahan struktur kelembagaan.
5. Belum optimalnya peran/partisipasi semua pihak termasuk pihak swasta yang ada/berdomisili di Wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara yang dapat memberikan solusi dan sekaligus bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.



### **BAB III**

## **TARGET SERTA LOKASI PRIORITAS**

### **3.1 Target Program Penanggulangan Kemiskinan**

Sebagai tindak lanjut upaya penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Utara, diantaranya melalui program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara dengan melakukan identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, mulai dari kode rekening, sumber anggaran, rincian, keluaran, hingga lokasi.

Hasil *tagging* program/kegiatan/sub kegiatan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2024. maka disusunlah Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang memuat sasaran, program, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

Perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Utara melalui Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya dan menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran untuk kelompok miskin dan kelompok rentan di wilayah masing-masing.

Penentuan matrik serta lokasi prioritas pada Kecamatan Payakumbuh Utara untuk digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 3.1

**MATRIKS RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Kinerja	Pagu	
1	UNSUR KEWILAYAHAN	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM kelurahan 2. Persentase Lembaga Masyarakat (LPM, PKK, RT/ RW) yang Aktif	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	Kelurahan se Kecamatan Pyk Utara	9 kegiatan	474.832.030	Kecamatan Payakumbuh Utara
									Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		27 pormas	1.325.144.050	



Tabel 3.2

**MATRIK ALIRAN KAS PER SUB KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan I			Triwulan II		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan</b>														
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>														
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>														
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	474,832,030	474,832,030	25,781,710	286,788,760	27,309,890	22,281,710	28,089,530	7,964,530	23,781,710	7,964,530	7,964,530	20,916,070	7,964,530	8,024,530
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,325,144,050	1,325,144,050	91,330,950	720,476,042	45,188,550	151,697,917	140,887,025	3,653,750	93,367,667	12,780,000	62,519,250	3,242,900		
		<b>1,799,976,080</b>	<b>1,799,976,080</b>	<b>117,112,660</b>	<b>1,007,264,802</b>	<b>72,498,440</b>	<b>173,979,627</b>	<b>168,976,555</b>	<b>11,618,280</b>	<b>117,149,377</b>	<b>20,744,530</b>	<b>70,483,780</b>	<b>24,158,970</b>	<b>7,964,530</b>	<b>8,024,530</b>

## **BAB V**

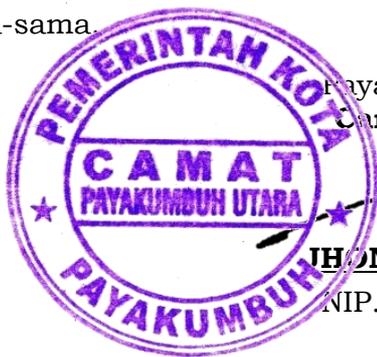
### **PENUTUP**

Penanggulangan kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat semata. Sangat banyak faktor eksternal dan internal yang tidak dapat dikontrol (uncontrollable), justru sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini diperlukan suatu gerakan penanggulangan yang bersifat komprehensif dan terus menerus, yang didukung secara penuh dari berbagai unsur, baik Pemerintah (Daerah maupun Pusat), Pengusaha, LSM, dan masyarakat luas.

Berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan menetapkan Rencana Aksi yang memuat sasaran, program, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga bisa lebih tepat dalam mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, mengidentifikasi prioritas wilayah dan mengidentifikasi prioritas penerima manfaat.

Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara sangat tergantung pada komitmen, dukungan dan partisipasi aktif dari segenap unsur, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, akademisi dan swasta. Sehingga tanggung jawab untuk mendukung Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilaksanakan bersama-sama.



Payakumbuh, Januari 2024  
Camat Payakumbuh Utara

**JHONNY PARLIN, S.ST.P, M.SI**  
NIP. 19790815 199810 1 001